Radar Bali

MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

MANGKRAK: Pembangunan Dermaga Watununggul, Kedonganan macet karena waktu mepet dan perpindahan kewenangan dari Pemkab ke Pemprov.

Dermaga Kedonganan Menggantung

Wewenang Pindah ke Pemprov

MANGUPURA - Batal digarap pada 2015, kelanjutan proyek pengembangan Dermaga Watununggul Kedonganan kini justru menggantung. Bantuan APBN sebesar Rp 24 miliar yang sudah turun dan dikembalikan ke kas negara pun terancam sulit didapat kembali. Pasalnya, wewenang untuk mendapatkan dana bantuan tersebut berpindah ke tangan Pemprov Bali

Baca **Dermaga...** Hal 31

Nasib Dermaga Kedonganan

- Berdasarkan pada UU No 23/2014 tentang pemerintah daerah, urusan di laut 0 - 12 mil menjadi urusan provinsi.
- Akibatnya, pembangunan Dermaga Watununggul Kedonganan pun menjadi tertunda.
- Sebelumnya Pemkab Badung tidak bisa menggunakan bantuan APBN sebesar Rp 24 miliar pada tahun 2015 karena dananya cair menjelang akhir tahun. Sehingga dengan waktu mepet, terpaksa Badung mengembalikan dana tersebut.
- Jika ingin melanjutkan pembangunan dermaga tersebut, Pemprov Bali harus berjuang mendapatkan dana dari APBN karena kewenangannya ada di sana.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

hal 1

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 21

Radar Bali

Sambungan

Kembalikan Dana karena Waktu Mepet

■ **DERMAGA...**

Sambungan dari hal 21

Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanlaut) Kabupaten Badung, Made Badra menegaskan pemindahan wewenang itu didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. "Jadi, untuk dermaga di Kedonganan kami belum bisa pastikan karena sekarang wewenangnya pindah ke Pemprov Bali. Berdasarkan UU No 23/2014, urusan di laut 0 - 12 mil menjadi urusan provinsi," jelas Badra saat dikonfirmasi kemarin (30/11).

Atas dasar itu, lanjut Badra, maka dapat atau tidaknya bantuan dermaga tersebut tergantung perjuangan pemprov. Namun, menurut Badra, pengembangan dermaga Kedonganan sangat penting. Karena di Badung satu-satunya dermaga nelayan hanya ada di Kedonganan. Nelayan dari beberapa tempat melakukan bongkar muat dan transaksi di Kedonganan.

Di Kedonganan juga dermaga langsung terhubung dengan pasar ikan. Sehingga posisi dermaga Kedonganan sangat strategis untuk nelayan dalam memenuhi kebutuhan ikan di Badung. Dari nelayan di Kedonganan ikan didistribusikan ke kafe ikan bakar, hotel, dan sejumlah tempat lain. "Terutama halaman dermaga sangat perlu ditata. Pengembangan dermaga Kedonganan sangat perlu sekali," tandas Badra.

Badra menyebut dana Rp 24 miliar yang dikembalikan ke kas daerah karena alasan waktu yang mepet. Dana diterima pada saat menjelang akhir tahun. Sehingga untuk mengerjakan proyek selesai pada akhir tahun tidak bisa. "Karena itu dana kami kembalikan," tegasnya.

Sementara itu, warga tetap merasa kecewa dengan kondisi kelanjutan pengembangan dermaga Kedonganan. Selain dermaga, proyek pembuatan break water (pemecah gelombang) dan penataan pasar tradisional ikan itu sangat ditunggu warga. Selama ini, warga mengaku sudah yakin perbaikan itu akan datang. Ketut Puja, Bendesa Adat Kedonganan berharap pemerintah bisa mengusahakan agar dana bantuan bisa kembali cair.

Menurutnya, warga Desa Adat Kedonganan kembali meminta agar pemerintah melakukan penataan konsep Kedonganan minapolitan. Terlebih selama ini warga sudah mengeluarkan banyak uang untuk melakukan penataan sendiri. Salah satu yang ditata warga secara swadaya adalah sisi utara areal Pasar Kedonganan. "Bagaimana caranya agar tetap mendapat bantuan. Sudah banyak uang yang kami keluarkan. Kami banyak acara adat, keluar uang juga untuk menata sendiri. Jadi tolong perhatian pemerintah," ujarnya.

"Semestinya pemerintah memperjuangkan agar Kedonganan Minapolitan ini terwujud. Bukan hanya kebutuhan kami tapi kebutuhan masyarakat, dan pariwisata secara umum," pungkasnya. **(san/yes)**

hal 2

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 31

Radar Bali

SELASA 1 DESEMBER | TAHUN 2015

Gubernur "Kutuk" Pejabat Kota Buta

DENPASAR - Belum keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Sakit Indra yang selanjutnya bernama RS Mata Bali Mandara, membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika marah. Saking jengkelnya, Pastika sampai "mengutuk" para pejabat di Pemkot Denpasar buta. Hal itu dikatakan saat dia melakukan kunjungan kerja (kunker) di Ruang Praja Utama, Pemkot Denpasar, kemarin (30/11) ■

▸ *Baca **Gubernur...** Hal 31*

Jengkelnya Gubernur Saat Kunker

Denpasar

- Marah karena IMB perluasan RS Indra tak kunjung dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar.
- Menuding pejabat Pemkot Denpasar mempolitisasi perizinan RS Indra.
- "Mengutuk" para pejabat pemkot buta supaya tahu susahnya antre di RS Indra.

Badung

- Menuding Pemkab Badung sombong karena perda maupun perbup tanpa diklarifikasi gubernur.

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 21 dan 31

Radar Bali

Pemkab Badung Disebut Sombong

■ GUBERNUR...
Sambungan dari hal 21

"Coba tengok sekali-kali di RS Indra, jangan duduk saja. Bagaimana orang *ngantre* di sana. Saya doakan semua pejabat yang menghalang-halangi pembangunan dan perluasan RS Indra agar buta termasuk keturunannya biar tahu rasanya antre di RS Indra," tegasnya.

Sebelum mengeluarkan kutukan tersebut, Pastika sudah terlihat jengkel saat baru tiba di kantor Pemkot Denpasar. Saat itu, Pastika langsung menuding izin RS Indra terkesan dipolitisasi oleh pejabat Kota Denpasar. Ia juga memprotes sikap wali kota Denpasar yang tidak bisa ditemui selama dua bulan. "Saya suruh kepada kepala Bapedda provinsi untuk menghadap wali kota Denpasar. Tapi, tidak pernah bisa ditemui selama dua bulan. Lalu, saya perintahkan kepada kepala Bapedda, kenapa tidak ditendang saja pintu ruangan wali kota," tegasnya.

Pastika juga terlihat jengkel ketika membicarakan Sekda Kota (Sekkot) Denpasar AAN Rai Iswara. "Ini manusia satu ini (Sekkot) saya yang angkat. Awalnya manusia ini baik. Tetapi, setelah menjadi Sekkot manusia ini berubah total," ujarnya dengan nada sinis.

Kemarahan Pastika ini juga berlanjut saat berkunjung ke Pemkab Badung. Pastika tiba di Puspem Badung sekitar pukul 14.00 didampingi Wagub Sudikerta dan sejumlah pejabat teras Pemprov Bali. Pastika disambut penjabat (Pj) Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka dan Sekkab Komyang R Swandika. Saat memberikan sambutan, Pastika banyak melancarkan kritik pada Pemkab Badung. Kritikan keras dan menohok adalah banyaknya perda dan perbup yang tidak diajukan ke Pemprov Bali untuk dilakukan klarifikasi.

Menurut Pastika tidak adanya klarifikasi dari Pemprov Bali, itu menunjukkan jika Pemkab Badung sombong. Pastika menyindir Badung sombong karena Badung sebagai daerah kaya dan banyak uang. Dia mengambil ungkapan dari barat yang menggambarkan bahwa kekuasaan sangat dekat dengan kesombongan. "Kekuasaan, kekayaan melahirkan kejahatan. Kekuasaan membuat orang menjadi jahat," ujar Pastika. "Betapa banyaknya Perda dan Perbup (Badung) yang tidak diverifikasi. Sombong betul itu," imbuh Pastika dengan nada sedikit sinis.

Pastika meminta agar mencari ahli hukum tata negara untuk dimintai pendapat apakah perda maupun perbup sah tanpa diklarifikasi gubernur. "Coba cari ahli hukum tata negara perda dan perbup yang harus diklarfikasi apakah sah atau tidak. Kalau RAPBD Anda sah atau tidak kalau tidak diklarfikasi. Karena apa, karena sombong," sindirnya lagi.

Seolah ingin mempertegas, Pastika menanyakan kepada Kabag Hukum Setda Badung Komang Budi Argawa. "Kabag Hukum-nya siapa? Menurut Anda sah atau tidak itu, coba Anda jelaskan," perintah Pastika.

Komang Argawa langsung berdiri dan menjelaskan bahwa tanpa diklarifikasi perda dan perbup sah. Sempat terjadi perdebatan seru antara Pastika dan Argawa. Dijelaskan Argawa, dari tahun 2010 sampai 2015 perkembangan hukum sangat dinamis. Berdasarkan UU 12/2011, perda maupun perbup sudah sah setelah diundangkan atau ditetapkan bersama legislatif. "Berarti tidak sah? *Ya*, sudah duduk kamu," kata Pastika. "Sah Pak," jawab Argawa.

Argawa kembali menjelaskan, bahwa pemerintah pusat maupun provinsi bisa melakukan klarifikasi setelah diundangkan. "Izin Pak Gubernur, jadi sah karena sesuai undang-undang terbaru setelah diundangkan sudah sah. Adapun praktiknya, klarifikasi pusat atau provinsi bisa setelah diundangkan," jelas Argawa.

"Berarti RAPBD sah tanpa diklarifikasi?" tanya Pastika lagi. Argawa kembali menjawab pertanyaan Pastika dengan lugas. "Kalau RAPBD berbeda; Pak," sahut Argawa. Setelah memberikan penjelasan lugas, Argawa berhasil mematahkan argumen Pastika sebelumnya.

"Duel" terbuka antara Pastika dan Argawa ini berlangsung sekitar tiga menit. Pejabat dan pegawai yang hadir sempat terhenyak. Tapi, di barisan belakang banyak pegawai yang tepuk tangan memberi dukungan pada Argawa. "*Yes*!" teriak salah satu pegawai spontan.

Mendapat penjelasan Argawa, Pastika mulai merendah. Dia meminta agar Pemkab Badung selalu berkoordinasi dengan pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Terutama tentang masalah keuangan dan tata ruang. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Pemkab Badung dan pemprov. **(hen/san/yes)**

Edisi : _____

Hal : _____

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

KABAR BAIK: Para nelayan di Kedonganan melakukan persiapan sebelum melaut menangkap ikan mengarungi laut. Mereka d

Edisi	:	Selasa, 1 Desember 2015
Hal	:	22

Radar Bali

Nelayan Badung Digelontor Kapal dan Jukung

MANGUPURA - Nelayan di pesisir Badung Utara hingga Badung Selatan menuai angin segar. Ini menyusul rencana pemberian bantuan tiga unit kapal kapasitas 10 GT (*Gross Tonage*). Kapal ini akan diberikan kepada kelompok nelayan yang dinilai produktif tapi keterbatasan alat. Bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp 4,1 miliar ini akan diberikan tahun 2016 mendatang. "Ada tim khusus yang menyeleksi kelompok penerima nelayan. Seleksi ini harus ketat biar nanti bantuan ini tidak menggantung dan tepat sasaran," jelas Made Badra, Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanlaut) Kabupaten Badung kemarin (30/11).

Pejabat asal Kuta ini mengungkapkan, dengan kapal 10 GT itu sangat membantu nelayan. Pasalnya, dengan mesin 10 GT jangkauan tangkapan lebih dari 4 mil. Selama ini, nelayan melaut tidak bisa lebih dari 4 mil.

Dengan berlayar lebih dari 4 mil maka peluang tangkapan semakin besar. Untuk mendampingi bantuan kapal kapasitas 10 GT, Pemkab akan memberikan bantuan 3 unit jukung (perahu) lengkap dengan kapasitas mesin 15 PK. Jukung sepanjang 7 meter itu dinilai tepat bagi nelayan yang melaut selama satu hari penuh. "Tujuannya adalah meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Sehingga stok ikan di pasar bisa terjaga," imbuh Badra.

Ditambahkan Badra, pihaknya juga mengusulkan bantuan 30 unit mesin tempel kekuatan 30 PK. Sama dengan pemberian bantuan kapal, mesin tempel juga akan diberikan pada kelompok nelayan yang potensial. Di Badung sendiri ada 20 kelompok nelayan tersebar dari Pantai Cemagi hingga Uluwatu. Hanya saja, tak semua kelompok tersebut produktif dan potensial. Karena itu, pihaknya perlu menyeleksi ketat calon penerima bantuan. "Kalau bantuan perahu dan mesin ini sumbernya APBD Badung 2016. Selama tidak ada koreksi dari dewan, tapi kami harapkan sih tidak ada koreksi," pungkasnya. **(san/rid)**

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 22

Radar Bali

Sah, APBD Karangasem 2016

Suparta Resmi Gantikan Mas Sumatri

AMLAPURA - Setelah sempat melakukan pembahasan, DPRD Karangasem mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karangasem tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1,5 triliun. Pengesahan itu melalui rapat paripurna DPRD Karangasem, yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, Senin (30/11). Paripurna kemarin juga dihadiri Penjabat Bupati Karangasem, Ida Bagus Ngurah Arda.

Meski semua fraksi menyetujui APBD tersebut, namun masing-masing fraksi memberikan sejumlah usul dan saran terhadap APBD 2016, dan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang disetujui sebesesar Rp 4,5 miliar. "Dalam penyusunan APBD selanjutnya mengadopsi aspirasi dari reses yang dilaksanakan oleh DPRD," demikian saran Fraksi PDIP, yang disampaikan anggota DPRD Karangasem, I Komang Mustika Jaya, yang bertugas membacakan laporan gabungan komisi.

Terkait penyertaan modal PDAM, yang disetujui berdasarkan usulan eksekutif, Fraksi Nasdem mengingatkan PDAM bahwa pentingnya peningkatan system pelayanan secara terpadu, dan efisien kepada pelanggan, serta memperluas jangkauan pelayanan. "Terkait APBD, satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum perlu penambahan anggaran untuk pembangunan jalan baru pada daerah-daerah yang masih terisolir sehingga dapat memperlancar perekonomian daerah setempat," jelas Mustika Jaya, menyampaikan pandangan Fraksi Nasdem.

KADEK MERTAWAN/RADAR BALI

REZEKI NOMPLOK: I Nengah Suparta menjadi PAW I Gusti Ayu Mas Sumatri dan diambil sumpahnya kemarin.

Sementara Fraksi Partai Golkar menyarankan eksekutif agar pelaksanaan program mendapat pengawasan yang lebih ketat, sehingga bisa lebih efektif, efisien, terukur dan terarah. Begitu juga fraksi Gerindra, menyarankan agar eksekutif menggunakan anggaran secara efektif untuk kepentingan masyarakat Karangasem. "Pembangunan infrakstruktur tepat guna, tepat waktu, sesuai kebutuhan. Pendidikan dan kesehatan dari sisi anggaran agar ditingkatkan. Intinya, APBD 2016, berguna bagi masyarakat Karangasem," pinta Fraksi Demokrat, seperti dibacakan Mustika Jaya, yang seorang politikus Partai Golkar.

Fraksi Bhineka, yang merupakan gabungan anggota DPRD dari PKPI dan Hanura, itu mengingatkan pemerintah supaya segera menyosialisasikan sambungan air sebanyak 1.500 unit sebagaimana rencana PDAM setelah penyertaan modal Rp 4,5 miliar itu disetujui. Sementara itu, pada kesempatan kemarin, juga dilakukan sumpah terhadap I Nengah Suparta, selaku PAW (Penggantian Antar Waktu) dari I Gusti Ayu Mas Sumatri. Dengan pengambilan sumpah itu, Suparta yang politikus PDIP itu sah menjadi anggota DPRD Karangasem, menggantikan Mas Sumatri, yang memilih maju mencalonkan diri menjadi bupati Karangasem. Meski sudah sah menjadi anggota DPRD Karangasem, namun Suparta belum mendapat posisi di alat kelengkapan dewan. "Nanti Fraksi PDIP yang mengusulkan, karena Suparta dari PDIP," ujar Sumardi. **(wan/gup)**

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 25

Radar Bali

Tunjangan Pejabat Badung Dibatalkan

MANGUPURA - Pemkab Badung akhirnya lolos dari lubang jarum *deadline* pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2016. Melalui rapat alot dan ketat selama seharian, akhirnya RAPBD Badung 2016 disahkan oleh dewan Senin petang kemarin (30/11). Sejak pagi eksekutif dan legislatif sudah melakukan lobi-lobi. Dewan tidak terima kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang mencapai Rp 408 miliar. Dalam rancangan eksekutif mengusulkan TPP sebesar Rp 408,3 miliar, naik Rp 90 miliar dari tahun 2015 yang sebesar Rp 318,3 miliar lebih.

Informasi yang dirangkum koran ini, dewan mau menyetujui kenaikan tambahan penghasilan asal tunjangan perumahan dewan juga ikut dinaikkan. Dewan meminta kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp 9,7 miliar. Karena mentok tidak ada jalan keluar, eksekutif akhirnya membatalkan kenaikan TPP. Tapi eksekutif juga tak mau kalah begitu saja. Eksekutif juga menolak menganggarkan kenaikan perumahan dewan.

Pembatalan kenaikan TPP ini diakui Sekkab Badung Kompyang R Swandika. "Setelah dilakukan pembahasan

▸ Baca **Tunjangan...** *Hal 31*

Perumahan Dewan Juga Batal Naik

■ **TUNJANGAN...**

Sambungan dari hal 21

diputuskan rencana kenaikan tersebut diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat," jelas Ketua Tim Anggaran Pemrintah Daerah (TAPD) Badung, Kompyang R Swandika usai rapat.

Ditambahkan Kompyang, alasan ditariknya usulan TPP ini karena untuk kepentingan masyarakat. Anggaran itu diarahkan masuk belanja publik seperti perbaikan infrastruktur seperti pembangunan irigasi dan pelayanan publik. "Ini lebih prioritas ketimbang kami menaikkan TPP," paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan nilai TPP saat ini pihaknya masih sangat bersyukur apalagi sekarang adalah HUT Korpri dipastikan semangat kerja pegawai tidak akan menurun.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria mengakui, untuk tunjangan perumahan dewan yang dirancang Rp 9,7 miliar lebih atau naik sekitar Rp 428 juta lebih juga dibatalkan. "Hal ini dilakukan karena belum adanya Perbup yang mengatur dan perlu adanya kajian teknis terkait masalah itu. Kemungkinan di perubahan dipasang," terang Satria.

Terkait hibah kepada masyarakat yang diarahkan DPRD sebesar Rp 93,6 miliar lebih serta hibah kepada banjar adat, desa adat dan subak sebesar Rp 19,9 miliar lebih juga masuk dalam RAPBD 2016. Mengenai pencoretan TPP, kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan, termasuk masalah hibah ini disetujui seluruh anggota dewan.

Dengan keputusan tersebut, maka bisa dikatakan eksekutif unggulu 2 - 1 melawan legislatif. Pasalnya, meski TPP dibatalkan, tapi eksekutif berhasil membuat rencana kenaikan tunjangan perumahan batal. Dana hibah yang selama ini dijadikan senjata dewan mengancam tidak mau membahas RAPBD juga tidak bisa dicairkan.

Secara umum postur RAPBD 2016 pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp 3, 5 triliun berubah menjadi Rp 3,7 triliun. Belanja daerah yang semula dirancang sebesar Rp 3, 6 triliun berubah menjadi Rp 4 triliun. "Dengan demikian maka ranperda tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 dapat disepakati, untuk selanjutnya dapat ditetapkan setelah dievaluasi oleh Gubernur Bali," tegas Satria. **(san/yes)**

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 21 dan 31